

Muktamar XXVII NU

Menanti Gemerlap Bintang Bertabur di Langit Situbondo

Mohammad Fajrul Falaakh

BERITA-BERITA yang beredar saat mendekati *Muktamar XXVII Nahdlatul Ulama* di Situbondo, Jawa Timur, 8-12 Desember 1984 ini menyatakan bahwa momentum tersebut merupakan saat terberat yang pernah dialami organisasi keagamaan terbesar Indonesia ini. Ada benarnya memang, di satu pihak NU sedang mengalami kepekatan cuaca gerakannya, dilain pihak besarnya potensi yang ada dituntut dapat didinamisir bagi kepentingan agama, bangsa dan negara. Artinya tuntutan terhadap *jami'iyah diniyah Islamiyah* (perkumpulan keagamaan keislaman) ini agar mampu mengorganisir berbagai sumberdaya dalam kiprah pengabdianya.

Tak dapat diabaikan bahwa perkumpulan para ulama tradisional tersebut telah memberi andil nyata dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Sejak awal berdirinya telah menampakkan kemanfaatan bagi umat dan rakyat di Nusantara, dan bahkan lebih luas. Terlihat misalnya pada tuntutan para pendiri NU kepada penguasa baru semenanjung Arab dinasti Ibnu Saud.

Makna Internasional

Ketika NU didirikan pada tanggal 31 Januari 1926, bersamaan dengan itu dibentuk pula para ulama pendiri NU untuk menyalurkan aspirasi keagamaan mereka dalam skala mondial. Ketidakersaluran aspirasi mereka di Tanah-Air mesti ditunjuk sabagai penyebabnya. Kelompok-kelompok umat Islam di Indonesia yang ada pada waktu itu telah menyumbat kepentingan NU sehingga jalan keluar harus ditempuh. Konsensus memang telah ditinggalkan, jadi penampilan balik dilakukan.

Yang menjadi kepentingan ulama tradisional waktu itu sepenuhnya adalah masalah keagamaan. Itu sebabnya sejak pertama NU berangkat dari wawasan keagamaan (yang telah membudaya). Sebab penganut ajaran dan penegak *panji Islam ahlussunnah wal jama'ah ala ahadil madzahibil arba'ah* Komite Hijaz yang dibentuk para pendiri NU melakukan tuntutan sesuai dengan ajaran tersebut (untuk keterangan madzhab lihat KH Ahmad Shiddiq, *Khittbah Nahdliyah*, 1980).

Kepada penguasa baru Arab, *Raja Saudi*, NU mengajukan tuntutan berikut. *Pertama*, menuntut kebebasan mengajarkan dan menganut salah satu dari ajaran empat besar imam madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali) berlaku di Saudi Arabia; *Kedua*, mempertahankan dan memeriahkan tempat-tempat bersejarah bagi umat Islam seperti Makam Rasulullah, makam Syuhada Perang Badr dll.; *Ketiga*, mengumumkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji keseluruhan penjurur dunia dan memudahkannya; dan *akhirnya* menuntut agar hukum-hukum di Saudi ditulis, sehingga dapat diketahui serta meminta jawaban resmi atas tuntutan NU.

NU berhasil , dan nampak eksistensinya mulai nyata justru dengan langkah internasional. Meski tak berpretensi sebagai kontributor utama namun umat Islam (di dunia) mesti teringat akan keberhasilan tersebut (untuk tidak menganjurkan berterimakasih), sehingga khazanah intelektual umat Islam (ajaran madzhab) dan peninggalan-peninggalan sejarah Islam tidak lenyap dari semenanjung di padang pasir tersebut. Dengan demikian nyata pula kedudukan ulama sebagai pendiri, pemimpin, pengendali dan panutan umat dalam NU, dari mereka dituntut peran sebagai *bintang-bintang* yang akan menerangi kegelapan umat, memandu perjalanannya dan mengawal hati nurani massa. Itulah yang disimbolkan dengan *bintang sembilan mengitari jagat bertali*. Persoalannya ialah, seberapa terang gemerlap bintang itu selama NU berdiri hingga kini dan akan datang.

Perluasan Wilayah Garap

Memulai dari masjid, pesantren dan tradisi keilmuan (seperti mudzkarah –diskusi– masalah-masalah keagamaan), usai dasawarsa pertama perjalanan NU kemudian terjadi perluasan wilayah garap dengan memasuki aktifitas politik. Keterlibatan NU dalam MIAI (Majlisul Islam ‘Ala Indonesia. Dewan Tertinggi Islam Indonesia) pada jaman Belanda dan MASYUMI (Majelis Syura Muslimin Indonesia, Majelis Permusyawaratan Mulimin Indonesia) pada jaman Jepang dapat ditunjuk sebagai contoh.

Selain itu tak diragukan lagi bahwa basis-basis NU (pesantren) di seluruh Tanah-Air merupakan kubu-kubu proses perluasan dan pertahanan Islamisasi penetratif di Indonesia- yang tak larut karena penjajahan. Yang perlu dicatat, seperti tulis *Mitsuo Nakamura*, jaman Belanda menampakkan peran NU yang menetapi sikap politik nonkooperatif secara ketat *Vis a Vis* pemerintah kolonial. Berbagai bentuk keresahan di pedesaan yang eksplosif merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gerakan kaum ulama tradisional terhadap Belanda. Lebih lanjut dapat diabstraksikan bahwa Islam di Indonesia telah menempati kedudukan dalam nasionalisme (baca: *proto nationalism*).

Perjalanan sejarah lalu menunjukkan bahwa menyusul pengketatan dan penahanan terhadap dedengkot NU pada jaman Jepang membuat NU, juga kalangan Islam lainnya, dipaksa bekerjasama dengan pemerintah pendudukan Jepang. Namun harus disadari bahwa penolakan *Rais Akbar NU* terhadap penghargaan pemerintah balatentara dan perlawanan bersenjata tokoh NU Singapura, *KH Zainal Musthafa*, merupakan indikasi bagi ketidakluluhan NU dalam kondisi sosio-politik waktu itu.

Intensitas keterlibatan NU dalam persoalan-persoalan politik makin besar, meski dalam dirinya masih penuh sebagai *jami’iayah diniyah Islamiyah*. Dan proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan formalisasi keterkaitan NU secara integratif terhadap persoalan bangsa dan negara. Sumbangan tokoh-tokoh NU dalam proses perumusan *dasar negara* dan *konstitusi* Indonesia serta pertahanan fisik spiritualnya melalui *Resolusi Jihad 22 Oktober 1945* boleh ditunjuk sebagai karya monumental ‘kaum bersarung kumuh’ bersama yang lain. Namun peran itu agaknya diabaikan, sehingga partisipasi NU terhadap republik melalui partai Masyumi pada dasa warsa pertama Indonesia hanya dinilai sebagai ‘juru doa’ dalam Masyumi. Keanggotaan istimewa NU di dalamnya tak lebih dari verbalisme kosong yang dilakukan kalangan intelektual dalam Masyumi. Tak pelak lagi katup kejengkelan terbuka, dan citra non intelektual sekali lagi hendak menunjukkan eksistensinya.

Itulah yang kemudian dilakukan NU pada tahun 52 ketika ia 'menyusul' jejak PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia) yang lebih dulu keluar dari Masyumi.

Tak mengherankan (dan justru diharap) kalangan NU, prestasinya mencuat naik sebagai 'empat besar' dalam gelanggang resmi politik Indonesia membuat terpana banyak pihak purna pemilu 1955. jarak pendek tiga tahun tentu tidak dapat dipakai sebagai ukuran buat menjelaskan keberhasilan tersebut. *Alfian* menganalisa bahwa kenaikan kursi NU sebesar hampir 600% (dari 8 menjadi 45) di parlemen disebabkan oleh keberhasilannya membangkitkan identitas Islam dan sekaligus golongan, dan perasaan anti Komunis (*Alfian, Pemikiran dan Perubahan Politik di Indonesia, 1978: 33*). Disamping itu harus pula disadari bahwa selama tida dasa warsa sebelumnya NU melakukan upaya sosialisasi dan rekrutmen terhadap massa rakyat di tingkat bawah. Tentu saja kerekatan antara elite dan massa dalam NU telah terjadi. Ditambah dengan kehadiran figur-figur kyai ulama yang kharismatik dan kebulatan ikatan emosi-relegius memperkuat keberhasilan tersebut. NU mengukuhkan diri sebagai partai politik.

Tanpa Kehilangan Ciri

Sebagai partai politik keterlibatan NU dalam pemerintahan memang makin nyata. Hal itu terlihat dengan keikutsertaan para tokohnya dalam lembaga-lembaga kenegaraan baik tingkat daerah maupun pusat, seperti keikutsertaan dalam kabinet, konstituante, parlemen, hingga persetujuan NU terhadap keputusan 'kembali ke UUD '45 ' yang mengakhiri masa demokrasi parlementer di Indonesia. Tetapi NU tetap menampilkan watak keagamaan yang menjadi ciri khasnya. Rumusan program perjuangan partai NU ternyata tidak meninggalkan ciri tersebut: NU, bagaimanapun, justru merupakan partai politik yang tetap menggarap pekerjaannya semula sebagai *jami'iyah diniyah Islamiyah yaitu: bidang ilmu pengetahuan keagamaan melalui pesantren dan tradisi bermadzhab, bidang sosial budaya dengan menggarap darul aitam (rumah yatim) dan fakir miskin serta peningkatan taraf sosial ekonomi masyarakat.*

Bidang garap ini diorganisir melalui barbagai organisasi *onderbouw* NU seperti: Muslimat dan Fatayat (masalah kewanitaan), Anshor dan PMII (sebelum independen) untuk masalah pemuda dan mahasiswa, organisasi pelajar NU (IPNU/IPPNU), organisasi kebudayaan, perburuhan, pertanian dll. Akan tetapi ujung dari perluasan wilayah garap itu memang tak menyenangkan. Cuatan penampilan NU pada masa demokrasi parlementer dan kontroversi keterlibatan NU pada masa *Nasakom* (Nasionalis, Agama dan Komunis) yang dilanjutkan dengan upaya NU menyelamatkan republik maupun topangan terhadap tegaknya kepemimpinan (Presiden Sorharto) pada dasa warsa enampuluhan ternyata telah menyita energi yang cukup besar. Sehingga bidang garap yang semula menjadi modal pokok gerakan ulama pesantren ini diabaikan. Memang kondisi waktu itu merangsang serta keterlibatannya secara penuh dan potensi serta kiprah memungkinkannya. Akibatnya modal dasar NU dialokasikan buat kepentingan politik praktis. Memang tidak salah, lebih-lebih dalam manuver-manuver politiknya selalu dicoba berlandaskan kaidah-kaidah agama dan wawasan budayanya.

Hanya saja ketimpangan dalam menangani bidang garap secara adil pada akhirnya memukul balik peran NU dalam skala nasional. Ditambah dengan penampilan politik yang menampakkan kecenderungan oposisi dan bermuara pada istilah *Nakamuara*: tradisoanalisme, radikal, NU terbelenggu dalam jaring politik nasional di tengah akselerasi pembangunan fisik-ekonomi Indonesia. NU nyaris tak berkutik, dan upaya menggeliat bangun dari belenggu tersebut makin disadari serta dilakukan.

Menuju Gemerlap Bintang

Di balik kisah-kisah sukses NU ternyata terdapat dinamika internal, atau bahkan konflik laten, yang menyertai proses perjalanannya. Kemelut berkepanjangan yang terlihat pada dataran formal berskala nasional pertanda sedang terjadi transisi dalam organisasi sosio-keagamaan terbesar di Indonesia ini (menurut *Amin Iskandar* bahkan terbesar di dunia). Upaya menggapai sukses yang selama satu dasawarsa ini nyata terlepas agaknya mulai dilakukan secara fungsional.

Muncul sebagai tandingan utama Golkar, dan meninggalkan delapan partai politik lainnya, NU segera menyatakan diri sebagai organisasi sosial-keagamaan murni pada purna Pemilu 1971. Pesta politik pertama jaman Orde Soeharto ini memang menghasilkan kenaikan kursi NU di parlemen (dari 45 pada tahun 1955 menjadi 58 pada tahun 1971). Seorang guru besar ilmu politik *Ohio University, USA, R William Liddle* berkomentar untuk ini. Menurutnya, selain satu, semua partai politik terkubur di bawah hujan salju kemenangan Golkar. Hanya NU yang berakar di pedesaan Jawa, yang dipimpin para guru (ulama-pen) yang tidak terikat dengan gaji pemerintah dan secara organisasional tidak terganggu selama tiga pemerintahan pos-kemerdekaan, bisa menambah sedikit prosentase suara 1955-nya (lih. Terj. *Pemilu 1971*, h 10).

Meski bisa bertahan berhadapan dengan desain politik nasioanal, NU menyatakan *kembali kepada semangat 1926* pada *Mukatamar XXV*, Desember 1971, di Surabaya. Empat hati menjelang wafat, *Rais Aam NU KHA Wahab Hasbullah* memberi isyarat dalam *khutbah iftitah* (pidato pembukaan) muktamar tersebut. Menurut almarhum, kembali kepada semangat 1926 berarti kembali kepada pegangan aqidah, syari'ah dan himmah Islam ahlussunnah wal jama'ah dalam berbagai aspek kehidupan; dan menempatkan ulama sebagai pemimpin tertinggi organisasi. Tanpa itu semua maka organisasi ini tak patut disebut *Nahdlatul Ulama* (lih. Saifuddin Zuhri, *KHA Wahab Hasbullah Bapak dan Pendiri NU*, 1983: 117-128). Pernyataan secara eksplisit kemudian dituangkan dalam *Mukatamar XXVI* di Semarang, 1979, bahwa NU kembali menjadi *jami'iyah diniyah* (perkumpulan sosial keagamaan) murni dan aspirasi politiknya tersalur lewat PPP (Partai Persatuan Pembangunan).

Namun saat transisi memang berproses, tak dapat serta merta di akhiri. Secara fungsional keterlibatan NU dalam masalah politik masih cukup nyata. Bahkan di tengah kepekatan kemelutnya justru persoalan itu memuncak dengan 'tantangan' berasas Pancasila. Tantangan memasukkan slogan sosio-politik (integrasi sistem sosial-politik ke dalam sistem keagamaan, agama melegitimasi sistem sosial-politik) telah terjawab pada *Munas* (Musyawarah Nasional) Alim-Ulama NU Situbondo, Desember 1983, lalu.

Dengan demikian suatu tahap penyelesaian masa transisi NU telah tercapai. Seperti dinyatakan Abdurrahman Wahid (*Kompas: 16/12/83*), apakah ada *kepemimpinan yang mampu memunculkan rumusan menerima asas Pancasila tanpa megorbankan jiwa perjuangan Islam* yang dibutuhkan NU saat ini, bahkan secara luas merumuskan kaitan NU dengan parpol. Jawaban telah diperoleh, sedikitnya, dari *Munas 1983* lalu yang barangkali tak jauh berbeda dari penilaian *Nakamura* terhadap Mukatamar XXVI tahun 1979 bahwa cara persidangan NU meyakinkan makna sebenarnya musyawarah-mufakat yang seringkali secara keliru dipandang sebagai kesenangan berkompromi.

Kalau *Fachri Ali* benar menganalisa bahwa masadepan NU ditentukan pula oleh kemampuannya menempatkan *Kekukuhan legitimasi agama* yang selama ini agak memudar (*Panji Masyarakat: 01/01/1984*), maka telah teraih. Pada akhirnya persoalan NU tentu tak sebatas itu. Yang diperlukan, lalu, memahami keberadaan NU secara integral serta memaknakan kehadirannya secara cermat di daerah-daerah pergulatan yang luas dan dalam tempo panjang. Muktamar ke-27 ini diharapkan menjadi tonggak re-dinamisasi kiprahnya. Jutaan kaum *Nahdliyin* hanya mampu menanti gemerlapan bintang betabur di langit Situbondo, sebab hanya para dedengkot dan *muktamirin* yang berkompeten memulai. (Sumber: *Kedaulatan Rakyat, 7/12/1984*)